



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Motto dan Persembahan	iv
Pengantar	v
Daftar Isi	x
Intisari	xvii
Abstract	xviii
Daftar Singkatan	xix
Daftar Tabel	xxi
Daftar Gambar	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	35
C. Tujuan Penelitian	36
D. Keaslian Penelitian	37
E. Kegunaan Penelitian	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
1. Tinjauan Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	41
2. Tinjauan Tentang Paradigma Analisis Terhadap Peraturan Daerah.....	53
a. Analisa Peraturan Daerah Dengan Metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).....	53
b. Analisa Peraturan Daerah Dengan Metode <i>Good Regulatory Practises</i>	

c. Analisa Peraturan Daerah Dengan Metode <i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)</i>	65
d. Analisa Peraturan Daerah Dengan Metode <i>Fishbone</i>	69
e. Analisa Peraturan Daerah Dengan Metode <i>Sustainable, Development and Engineering Regulation (SDER)</i>	72
3. Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.....	75
a. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah	75
b. Pembentukan Peraturan Daerah Atribusi	81
c. Pembentukan Peraturan Daerah Delegasi.....	86
4. Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik....	89
BAB III LANDASAN TEORI.....	94
1. Teori Negara Hukum.....	94
a. Negara dan Peraturan – Peraturan Hukum	94
b. Kepastian Hukum	103
2. Teori Perundang-Undangan	109
a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	109
b. Penjenjangan dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	111
c. Antimoni dan Azas Preferensi	118
d. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan	125
3. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	129
a. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	129
b. Peranan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat	138



4. Teori Politik Hukum	141
a. Korelasi antara Politik Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan.....	141
b. Politik Hukum Nasional.....	146
5. Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.....	148
 BAB IV METODE PENELITIAN	155
1. Jenis Penelitian	155
2. Bahan/Materi Penelitian	157
3. Data Penelitian	158
4. Alat Pengumpulan Data	162
5. Cara Pengumpulan Data	162
6. Analisis Data.....	165
7. Penarikan Kesimpulan	167
8. Jalannya Penelitian	167
9. Sistematika Penelitian	168
 BAB V PENGATURAN MENGENAI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	171
A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia	174
B. Undang-Undang Negara Republik Indonesia	182



B.1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (UU 10/2004)182

B.2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU 12/2011) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(UU15/2019).....187C. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.....224D. Peraturan Menteri Republik Indonesia234
D.1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
.....234D.2.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
.....254D.3.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang
dibentuk di Daerah (Permenkumham 22/2018) oleh Perancang Peraturan
Perundang-Undangan.....257E. Gagasan Ke Depan Mengenai Pengaturan Harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah Di Indonesia264

E.1. Penyempurnaan Pengaturan Harmonisasi Rancangan

Peraturan Daerah	264
E.2. Penguatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian/Lembaga Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengharmonisasian Rancangan Perda.....	307
E.3. Formulasi Penyempurnaan Pengaturan mengenai Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah.....	327
E.4. <i>Omnibus Law</i> Di Tingkat Daerah	344

BAB VI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BAIK	352
--	-----

A. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Secara Kelembagaan.....	352
A.1. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Pusat	352
A.1.1. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pusat	352
A.1.2. Rancangan Peraturan Daerah Evaluasi	360
A.2. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah	367
A.2.1. Rancangan Perda Non Evaluasi	367
A.2.2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi	378



B. Aspek-Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Pengharmonisasian

Rancangan Peraturan Daerah.....	380
B.1. Aspek Materi Muatan	380
i. Nilai – nilai Pancasila	381
ii.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	
Tahun 1945	396
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara	
Republik Indonesia Tahun 1945.....	397
b. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara	
Republik Indonesia Tahun 1945	402
iii.Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah	405
iv. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	409
v. Kebutuhan Masyarakat	424
B. 2. Teknik Penyusunan	429
B. 3. Aspek Lainnya	431
B. 3.1. Aspek Hukum Tidak Tertulis	431
a. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	432
b. Hukum Adat	434
B.3.2. Pendapat Para Ahli (Doktrin)	
yang dituangkan pada Naskah Akademik.....	439



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BAIK

MIA KUSUMA FITRIANA, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,S.H.,M.Hum; Dr. Zainal Arifin Mochtar,S.H.,LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

C. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah 447

C.1. Tahapan Perencanaan 447

C.2. Tahapan Penyusunan 450

C. 3. Tahapan Pembahasan dan Penetapan 460

C.4. Tahapan Pengundangan 462

D. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik 463

D.1. Prinsip-prinsip /Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Baik 463

D.2. Indikator Pengharmonisasian Rancangan Perda Sesuai Prinsip-Prinsip
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik
..... 482

D.2.1. Indikator Formil 482

D.2.2. Indikator Materiil 493

D.2.3. Indikator Administratif 505

BAB VII PENUTUP 510

A. Kesimpulan 510

B. Saran 515

Daftar Pustaka xxiii

Daftar Riwayat Hidup xxxviii